

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Mengenai Pelaksanaan Program Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM	1. Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Melaksanakan ketentuan dari delegasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Peraturan Menteri ini belum mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022. Hal ini disebabkan pada saat penyusunan peraturan menteri tersebut masih mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.</li> <li>- Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga penyusunannya harus</li> </ul>	Dalam hal Peraturan Menteri ini akan dilakukan perubahan, Unit Kerja terkait perlu menyusun program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi yang telah disesuaikan, untuk selanjutnya dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri yang baru.

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>didasarkan pada dasar hukum atau payung hukum yang jelas. Hal tersebut merupakan bagian penting dari prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang undangan dalam sistem hukum di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang undangan merupakan 2 (dua) konsep mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Adapun hierarki peraturan</li> </ul>	

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>perundang undangan mengatur hubungan dan tingkatan kekuatan hukum antara berbagai jenis peraturan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berbunyi: "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: </li> </ul>	

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu);</li> <li>c. Peraturan Pemerintah (PP);</li> <li>d. Peraturan Presiden (Perpres);</li> <li>e. Peraturan Daerah Provinsi; dan</li> <li>f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>- Selain jenis peraturan tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang</li> </ul>	

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis peraturan perundang undangan dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank</p>	

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.	
		2. Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	- Beberapa program prioritas, seperti Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan Pendataan Lengkap	

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Koperasi dan UMKM (PL KUMKM), dalam implementasinya telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan target yang ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh masing masing unit kerja penanggung jawab program, terdapat sejumlah penyesuaian yang perlu dilakukan dan berdampak pada layanan program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejalan dengan perkembangan terkini serta alokasi penganggaran yang telah ditetapkan, untuk program PPKL diperlukan perubahan</li> </ul>	

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>nomenklatur kegiatan dari PPKL menjadi Tenaga Pendamping Koperasi (TPK). Di samping itu, terkait insentif pelaksanaan program pendataan, satuan biaya yang semula dihitung per unit data akan disesuaikan menjadi satuan biaya berdasarkan alokasi jumlah data, sebagaimana akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau pedoman kegiatan yang ditetapkan oleh deputi penanggung jawab program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain kedua program tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha</li> </ul>	

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Kecil dan Menengah juga memiliki program prioritas lainnya yang menggunakan anggaran dekonsentrasi, antara lain program konsultan/pendamping PLUT, promosi produk UMKM melalui SMESCO Indonesia, serta pengawasan koperasi.	